

### **BAB III**

## **POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DALAM PROGRAM SANITASI INTERNASIONAL**

Pada bab ini menjelaskan bahwa usaha yang telah dilakukan pemerintah Jepang dalam membangun sanitasi yang baik didalam negeri merupakan bagian dari misi Jepang untuk membangun standarisasi internasional tentang sanitasi yang kemudian disalurkan melalui bantuan Jepang kepada negara lain.

Selain itu, pada bab ini akan membahas bagaimana usaha Jepang membawa isu sanitasi ke taraf Internasional yang bertujuan untuk memperluas norma domestik Jepang terkait kebersihan dalam bidang sanitasi. Selain itu juga akan dijelaskan peran pemerintah sebagai aktor dalam perluasan norma dan bagaimana pemerintah menggunakan ODA sebagai alat dalam perluasan norma. Kemudian, akan dijelaskan bagaimana bantuan sanitasi Jepang disalurkan kepada negara-negara poor sanitation guna menumbuhkan norma yang sesuai dengan norma Jepang kepada negara-negara tersebut.

#### **A. ODA Jepang sebagai Alat Politik Luar Negeri**

ODA merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan periode pengembalian yang lebih lama dibandingkan dengan pinjaman. Bantuan asing pertama di Jepang untuk negara berkembang awalnya berupa bantuan multilateral melalui partisipasinya di *Colombo Plan for Cooperative Economic and Social*

*Development* untuk pembangunan ekonomi dan sosial koperasi di Asia dan Pasifik pada bulan Oktober 1954. Colombo Plan pada awalnya diluncurkan pada 1950 di Kolombo, Ceylon (sekarang Sri Lanka) dalam rangka memfasilitasi kerjasama ekonomi dan teknis di antara negara anggota Persemakmuran Inggris.

Kemudian pada tahun 1955, penerima program bantuan diperluas. Jepang memberikan US \$100.000 untuk kerjasama teknis di bawah *Colombo Plan*. Sejak saat itu, kerjasama teknis tetap menjadi unsur penting dari ODA Jepang. Pada 1958, Perdana Menteri Kishi Nobusuke menandatangani perjanjian pertama Jepang untuk memberikan pinjaman yen kepada India dan masih dalam bentuk bantuan multilateral, melalui konsorsium Bank Dunia untuk India. Pinjaman Yen juga mulai memainkan peran penting dalam ODA Jepang, tetapi lebih sebagai bentuk bantuan bilateral.

Memberikan bantuan pada akhir 1950-an adalah keputusan politik yang berat bagi Jepang karena Jepang belum bisa memenuhi kebutuhan keuangan sendiri pada masa itu. Pada tahun 1960 dibentuk DAC atau *Development Assistance Committee* yang mana Jepang turut bergabung didalamnya sebagai anggota pendiri, dibalik keanggotaan Jepang di dalam DAC terdapat motif untuk meningkatkan bantuan Jepang kepada negara Asia. Jepang terus memperluas ODANYA pada tahun 1964, jumlahnya mencapai US\$100 Juta. Pada tahun 1976, Jepang menjadi negara pendonor terbesar kedua di DAC.

Pada 1960-an dan 1970-an, ODA Jepang semakin berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada masa ini ODA Jepang mengalami kritik dari negara pendonor lain. ODA Jepang dianggap terlalu komersial dan sangat terikat dan lebih dianggap sebagai promosi ekspor barang Jepang. Bantuan yang terikat atau *Tied Aid* berarti bahwa negara penerima dibatasi dalam pengadaan peralatan dan layanan dari perusahaan dari negara pendonor dan hal ini sering dilakukan oleh pendonor yang tidak terlalu kompetitif di pasar internasional. Alasan promosi ekspor Jepang menjadi bumerang di luar negeri karena bantuan Jepang dipandang terlalu berorientasi. Dalam menanggapi kritik ini, Jepang mulai membuka keterikatan ODA-nya dan memungkinkan penerima untuk menggunakan pemasok dan kontraktor dari pendonor lain bukan hanya Jepang. Jepang

merevisi perundang-undangan OECF dan Bank Ekspor-Import Jepang untuk memungkinkan organisasi ini untuk membuat pinjaman yang tidak terikat pada 1972.



\*This excludes Grant Aid which the Ministry of Foreign Affairs will continue to directly implement for the necessity of diplomatic policy.

Sumber: *\_(Japan's ODA and JICA, n.d.)*

*Gambar 11: Proses ODA Jepang disalurkan melalui JICA*

ODA Jepang disalurkan melalui JICA atau *Japan International Cooperation Agency*, JICA adalah agensi pemerintah resmi yang menyalurkan ODA Jepang kepada negara penerima. ODA secara luas dibagi menjadi bantuan bilateral, di mana bantuan diberikan langsung ke negara-negara berkembang, dan bantuan multilateral, yang diberikan melalui organisasi internasional. JICA memberikan bantuan bilateral dalam bentuk Kerjasama Teknis, Pinjaman ODA Jepang dan Bantuan Hibah (Japan's ODA and JICA, n.d.).

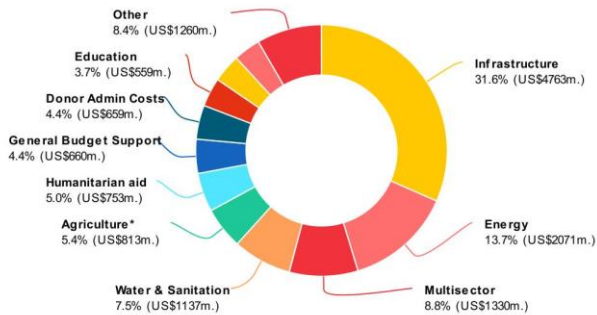
Jika melihat perjalanan ODA Jepang, Jepang telah berupaya memberikan bantuan kepada negara lain meskipun pada saat itu negaranya sendiri belum cukup memenuhi kebutuhan keuangannya. Hal ini tentu didasari oleh alasan tertentu, Jepang berusaha semaksimal mungkin untuk mendistribusikan ODANYA hingga menjadi pendonor kedua terbesar untuk mendapatkan *feedback* dari bantuan tersebut, di dalam ilmu Hubungan Internasional tidak ada sesuatu yang diberikan secara “cuma-cuma”, tindakan yang diambil suatu negara memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Bantuan yang diberikan Jepang kepada negara lain akan memberikan keuntungan bagi Jepang nantinya meskipun akan melalui proses yang lama (Japanese Foreign Policy Today, 2000).

Tingginya antusiasme Jepang dalam mendistribusikan ODA bukan hanya berdasarkan alasan untuk “beramal” namun untuk dapat melancarkan kebijakan luar negerinya, sejalan dengan rencana pemerintah untuk menggunakan ODA sebagai

instrumen diplomatik dan ekonomi yang strategis. ODA Jepang menjadi alat untuk Jepang berperan aktif dalam isu di ranah internasional setelah Jepang tidak lagi memiliki kekuatan militer yang maksimal.

#### JAPAN'S BILATERAL ODA BY SECTOR, 2017

Total: US\$15,079 million



OECD CRS. Gross disbursements. \*Includes agriculture, forestry, fishing, and rural development. In 2017 prices.

Sumber: (Japan's official development assistance (ODA) budget in fiscal year 2017, by ministry and agency, 2017)

*Gambar 12: Jenis dan jumlah ODA Jepang berdasarkan sektor pada tahun 2017*

ODA Jepang pada dasarnya terbagi dalam beberapa sektor, dimana didalam berbagai sektor yang ada, Jepang memiliki beberapa sektor yang menjadi prioritasnya diantaranya adalah infrastruktur, pertanian, energi, serta air dan sanitasi. Pada sektor tertentu Jepang merupakan pendonor terbesar dunia, salah satunya adalah dalam sektor air dan sanitasi.

## **B. Bantuan Sanitasi sebagai Program ODA Jepang**

Jepang secara historis telah mempromosikan penanggulangan dan pengurangan bencana yang berhubungan dengan air di ranah domestik, seperti koordinasi penggunaan air, dan pencegahan pencemaran air dalam rangka mengatasi masalah termasuk banjir, kekeringan dan polusi air yang diperburuk oleh faktor seperti pembangunan ekonomi, perubahan struktur industri dan urbanisasi maju. Selama masa rekonstruksi pasca-Perang Dunia II ketika Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Jepang mempromosikan manajemen sumber daya air regional dan pengembangan sistem penyediaan air, hingga mewujudkan pasokan air yang stabil dan perbaikan sanitasi di kota-kota besar di Jepang. Di daerah pedesaan, perbaikan lingkungan hidup, seperti dapur, toilet, dan proyek irigasi dipromosikan secara terintegrasi untuk meningkatkan standar sanitasi dan produktivitas pertanian. Selain itu, selama periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah melakukan berbagai upaya terhadap kemerosotan lingkungan air di sungai dan danau dengan cara menerapkan peraturan efluen dan memperbaiki sistem saluran pembuangan dan juga respon untuk menanggapi masalah subsidi lahan akibat penyedotan air tanah secara berlebihan dengan tidak hanya membatasi volume penarikan tetapi juga mempromosikan penggunaan air yang efektif melalui pengendalian kualitas air limbah industri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan air (Japan, 2006).

Setelah berhasil mengembangkan isu *water supply and sanitation* di negaranya dan menciptakan manajemen sistem sanitasi yang baik terutama dalam bidang manajemen limbah, distribusi air dan toilet, Jepang berusaha membawa isu ini ke taraf internasional. Salah satu cara startegis yang dilakukan Jepang adalah melalui ODA, Jepang berusaha untuk memasukan isu ini didalam ODANYa hingga akhirnya Jepang menjadi negara pendonor terbesar didalam bidang ini, bahkan isu sanitasi menjadi isu prioritas dari ODA Jepang.

Menurut laporan *UN Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation*, Jepang adalah pendonor terbesar pada bidang air dan sanitasi internasional, dan keahliannya dalam bidang ini telah banyak menguntungkan bagi negara berkembang untuk meningkatkan sistem sanitasi mereka. ODA Jepang dalam bidang sanitasi terhadap negara berkembang didukung oleh konsep *human security* yang mencakup perlindungan hak asasi manusia. Komitmen Jepang terhadap hak asasi manusia ditampilkan dalam bantuan pembangunan resminya dengan melakukan lebih banyak usaha untuk menjangkau mereka yang masih kekurangan akses terhadap air dan sanitasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki setidaknya akses dasar untuk air minum yang aman dan sanitasi yang baik, serta untuk mencapai MDGs. *UN Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation* menyatakan bahwa Jepang telah mengintegrasikan berbagai prinsip hak asasi manusia di dalam bantuan luar negerinya, Jepang memastikan

bahwa hak asasi manusia mencakup semua aspek di dalam bantuan luar negerinya (Center, n.d.).

Secara historis di taraf Internasional, Jepang telah memberikan bantuan dalam bidang pengurangan bencana yang berhubungan dengan air, koordinasi penggunaan air dan pencegahan pencemaran air dalam rangka mengatasi masalah termasuk banjir, kekeringan dan polusi air. Untuk meningkatkan kualitas air dan sanitasi di negara berkembang, bantuan Jepang didasarkan pada pengalaman, keahlian dan teknologinya. Pada *World Water Forum* ke tiga tahun 2003 di Kyoto, Jepang mengumumkan inisiatif ODA Jepang pada bidang air yang disertai dengan upaya luas mengenai bantuan untuk sektor air (Japan Development Assistance White Paper 2013, 2013).

Pada bulan Desember 2010, Jepang memimpin adopsi resolusi Majelis Umum PBB mengenai tindak lanjut *International Year of Sanitation* (2008) dan mendukung upaya global untuk mencapai "*Sustainable Sanitation: five year drive to 2015*," untuk mencapai MDGs pada tahun 2015. Sejak 2008, Jepang telah mempromosikan pengembangan fasilitas air dan sanitasi dan pada tahun 2012 telah melakukan berbagai upaya terkait sanitasi, diantaranya:

- 1.) Melaksanakan bantuan hibah dan proyek bantuan pinjaman untuk menyediakan air minum yang aman untuk 10.790.000 orang
- 2.) Memberikan dukungan untuk pembangunan kapasitas lebih dari 13.000 manajer dan pengguna di bidang sumber daya air (termasuk



personil yang relevan dalam pengelolaan air asosiasi koperasi desa).

Selain itu, pada 2013, Jepang mengumumkan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan untuk memastikan akses air minum yang aman dan fasilitas sanitasi untuk sekitar 10.000.000 orang selama lima tahun, serta memberikan dukungan untuk memberi pembinaan 1.750 insinyur dibidang air (Japan's Official Development Assistance White Paper 2013, 2013).

### **C. Peran Jepang di Beberapa Negara Poor Sanitation Country**

Menurut PBB, lebih dari 2.600.000.000 orang di dunia masih hidup tanpa akses fasilitas pembuangan limbah dan sanitasi yang baik. Di era modern dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, masih banyak orang yang buang air besar di tempat terbuka dan memilih semak-semak dibanding toilet yang layak, hal ini terjadi karena tidak adanya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain buang air besar di tempat terbuka yang akhirnya berdampak pada masalah kesehatan. Penyakit karena sanitasi dan air minum yang tidak bersih serta praktik kebersihan yang buruk menyebabkan 4,0% dari semua kematian dan 5,7% dari semua kecacatan atau kesehatan yang buruk di dunia (Unsafe drinking-water, sanitation and waste management , n.d.).

Menciptakan fasilitas sanitasi yang baik merupakan suatu tantangan tersendiri bagi setiap negara, terlebih bagi negara yang secara geografis

memiliki akses yang sulit terhadap air, selain itu masalah lain terkait kemiskinan disuatu negara juga sangat mempengaruhi pengembangan sistem sanitasi di suatu negara. Jepang telah berkomitmen untuk berperan aktif pada peningkatan kualitas sanitasi di taraf internasional, bahkan bantuan sanitasi merupakan salah satu prioritas Jepang. Bantuan Jepang pada bidang sanitasi utamanya ditujukan kepada negara yang dikenal sebagai negara *poor sanitation country*. Bantuan sanitasi diberbagai negara ini dapat disalurkan karena telah terjalin kerjasama antar kedua negara sebelumnya, karenanya penting untuk membahas hubungan kedua negara.

## **1. India**

Dengan populasi terbesar kedua di dunia, India merupakan negara dengan sistem sanitasi terburuk di dunia. Menurut WHO, hanya 21% dari total penduduk pedesaan yang dapat mengakses fasilitas sanitasi yang memadai pada 2008. Buruknya fasilitas sanitasi ini menyebabkan banyak wabah penyakit pada masyarakat. Data dari WHO menyebutkan, 626.000.000 orang India masih melakukan praktek buang air besar disembarang tempat, angka ini juga sekaligus menyumbang 90 persen dari 692.000.000 orang di Asia Selatan yang masih melakukan praktek buang air besar terbuka, selain 97.000.000 orang di India tidak memiliki akses ke sumber perbaikan air minum (Water sanitation hygiene, n.d.).

Budaya buang air besar di India sangat buruk dan jauh dari kata modern. Sekitar 450 juta orang masih buang air di taman bermain, di bawah

pohon, di pinggir jalan, rel kereta api dan tepi sungai. 157 juta penduduk perkotaan, tidak memiliki fasilitas toilet yang layak. Limbah padat dibuang ke sungai, menyebabkan penularan air. Bank Dunia mengatakan, satu dari sepuluh kematian di India disebabkan oleh sanitasi yang buruk..Hampir 44 juta anak di bawah lima tahun telah terhambat pertumbuhannya dan setiap tahun lebih dari 300.000 meninggal karena penyakit diare.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah India untuk menangani masalah sanitasi ini, diantaranya pada 2014, pemerintah berjanji untuk mengakhiri buang air besar sembarangan pada 2019. Pihak berwenang telah menggelontorkan dana sebesar \$29bn untuk program nasional, untuk membangun 49juta toilet. Setiap keluarga mendapatkan 12.000 rupee (\$187) untuk membangun toilet. Antara 1986 dan 1999 itu diinstal 9.4 juta toilet, memberikan 7,4 juta lebih banyak akses sanitasi setiap tahun. Tapi peningkatan jumlah toilet tidak menjamin peningkatan budaya buang air orang India. Sebuah survei yang dilakukan oleh *Research Institute for Compassionate Economics* di pada 2014 menyatakan bahwa 40% rumah tangga yang telah memiliki toilet, setidaknya satu dari anggota keluarga tersebut lebih suka buang air besar di luar (A.A.K, 2017).

Usaha pemerintah India dalam peningkatan kualitas sanitasi sangat memerlukan bantuan dari pihak luar terutama dari negara yang memiliki pengalaman dan teknologi yang baik dalam bidang ini. Karenanya, India menerima bantuan dalam bidang sanitasi dari Jepang guna mendukung terwujudnya sistem sanitasi yang lebih baik.

India dan Jepang memiliki dinamika hubungan yang baik, hubungan antara Jepang dan India telah dimulai pada abad ke-6 ketika Buddhisme diperkenalkan ke Jepang. Budaya India yang disaring melalui Buddhisme, telah memiliki dampak besar pada budaya Jepang, dan ini adalah awal dari tumbuhnya rasa kedekatan antara orang Jepang dan India. Setelah Perang Dunia II, pada 1949, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru menyumbangkan seekor gajah India ke Kebun Binatang Ueno di Tokyo. Hal ini membawa sinar cahaya ke dalam kehidupan orang Jepang yang masih belum pulih dari kekalahan dalam perang. Jepang dan India menandatangani perjanjian damai dan menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 28 April, 1952. Perjanjian ini adalah salah satu perjanjian damai pertama Jepang ditandatangani setelah Perang Dunia II.. Pada pasca Perang Dunia II, bijih besi dari India banyak membantu Jepang dalam pemulihan dari kehancuran pasca perang. Setelah kunjungan Perdana Menteri Jepang Nobusuke Kishi ke India pada 1957, Jepang mulai memberikan pinjaman Yen ke India, tepatnya pada tahun 1958 (Japan India Relation (Basic Data) , n.d.).

Dalam hal ODA, Jepang merupakan pendonor terbesar bagi India dan India merupakan penerima donor terbesar dari Jepang sekaligus tertua. ODA Jepang kepada India disalurkan melalui JICA. Dalam JICA sendiri India merupakan mitra tertua sekaligus terbesar.

Adapun bantuan Jepang dalam bidang sanitasi salah satunya adalah bantuan Jepang melalui JICA yang disalurkan untuk *Clean Yamuna Project*, yaitu proyek yang bertujuan untuk menambah kapasitas pengolahan limbah dengan membangun dan merenovasi pabrik pengolahan limbah dan saluran pembuangan untuk meningkatkan kondisi sanitasi penduduk. Instalasi Pengolahan Air Limbah atau *Sewerage Treatment Plan* (STP) diharapkan dapat mengolah limbah yang dihasilkan oleh sekitar 4 juta orang di Delhi. Instalasi STP yang didukung oleh JICA ini diadakan di Okhla, Delhi pada bulan Juli 2019 di bawah *Yamuna Action Plan* (III).

Pada kesempatan itu, Katsuo Matsumoto, Kepala Perwakilan JICA India mengatakan, "JICA telah mendukung pembangunan STP dan fasilitas pembuangan limbah sejak 1992 untuk peningkatan kualitas air Sungai Yamuna. Dukungan JICA untuk STP Okhla diharapkan dapat memperbaiki lebih dari 20% air limbah dibuang oleh warga Delhi. STP ini akan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan tersier dengan mengadopsi SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), sistem UV desinfeksi modern dan fasilitas pengelolaan lumpur. Saya berharap pabrik ini menjadi

infrastruktur berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan teknologi canggih".

Pinjaman yang disediakan oleh JICA untuk *Yamuna Action Plan* (III) adalah 32.571 juta Yen. Komitmen pinjaman kumulatif untuk ketiga fase *Yamuna Action Plan* adalah sebesar 63.677 juta Yen. Proyek ini mendukung pembangunan dan rehabilitasi 36 STP dengan total kapasitas perawatan 1.904 MLD di Delhi, Uttar Pradesh dan Haryana dimana Sungai Yamuna berlokasi.

JICA telah mendanai 25 proyek air dan sanitasi di seluruh India, senilai pinjaman ODA sebesar 752 miliar Yen. JICA mendukung pengembangan pasokan air dan infrastruktur pengolahan limbah untuk area perumahan, komersial dan industri di India. JICA juga telah memperkenalkan sistem tarif volumetrik untuk konsumsi air, peningkatan tagihan, manajemen aset yang efisien, dan memungkinkan pengurangan air non-pendapatan. JICA mempromosikan daur ulang dan penggunaan kembali air limbah. JICA terus bekerja untuk meningkatkan pembuangan kotoran di daerah pedesaan yang menghadapi masalah kesehatan karena fasilitas sanitasi yang tidak memadai (Clean Yamuna Project Gets a Boost through Inauguration of a New Sewage Treatment Plant in Delhi, 2019).

Bantuan lainnya yang diberikan Jepang kepada India dalam bidang sanitasi yaitu pembangunan toilet umum sebanyak 1.500 unit untuk mengurangi buang air besar ditempat

terbuka. Projek ini diawali dengan memberikan pembelajaran terkait sanitasi khususnya kepada wanita di India agar mereka lebih memahami konsep higienitas dan kebersihan, kemudian *output* yang dilakukan adalah dengan membangun toilet yang sesuai standar Jepang (Sakamoto, Japan-India Friendship Activities of JICA in India , 2018). Dengan dibangunnya berbagai fasilitas sanitasi seperti pengelolaan limbah dan toilet yang layak, lambat laun akan merubah kebiasaan dan budaya sanitasi orang India yang awalnya kuno menjadi lebih modern dan sesuai dengan standarisasi Jepang.

## **2. Indonesia**

Indonesia memiliki kurang dari 3% cakupan sistem pengelolaan limbah (selanjutnya akan disebut *sewerage*) yang memadai. Hal ini menjadikan Indonesia menderita keterbelakangan sistem *sewerage* dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya negara (sekitar 20% di Thailand dan 65% di Malaysia. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut "DKI Jakarta") juga telah mengalami keterbelakangan infrastruktur dasar termasuk, air dan sistem *sewerage*, meskipun pertumbuhan populasi yang cepat namun rasio cakupan sistem *sewerage* tetap serendah 7% (Statistik DKI Jakarta 2014-15). Hal ini mengakibatkan masalah lingkungan air seperti polusi sungai dan kualitas air, serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Karenanya Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk mempromosikan pengembangan sistem

pembuangan air untuk menghilangkan sumber polusi dan penyakit di masyarakat (Ex-Ante Evaluation (for Japanese ODA Loan) , 2019).

Selain itu, buruknya sistem sanitasi di Indonesia juga berdampak pada budaya MCK masyarakat Indonesia. Hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet yang layak, kebanyakan masih buang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, kanal atau ruang terbuka lainnya. Buang air besar yang terbuka bukan hanya menunjukkan budaya yang kuno, namun juga berisiko besar bagi kesehatan anak dan masyarakat. Buang air besar secara terbuka dapat mencemari pasokan air dan menyebabkan penyebaran penyakit diare. Seperempat dari jumlah seluruh anak di bawah 5 tahun di Indonesia menderita diare, yang merupakan penyebab utama kematian anak di Indonesia. Sebuah survei mengenai air minum yang dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2017, menyatakan bahwa 89 persen sumber air dan 67 persen air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri tinja. Selain itu, hanya 7 persen air limbah di Indonesia yang diolah dengan baik (Noorani, n.d.).

Indonesia sendiri telah menerima bantuan dari Jepang sejak 1954 dengan penerimaan *trainee* (peserta pelatihan) di bidang industri, transportasi, komunikasi, pertanian dan kesehatan. Bantuan Jepang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Indonesia melalui pengembangan kemampuan manusia, peningkatan infrastruktur ekonomi, sosial dan sebagainya. Pada



saat krisis ekonomi Asia setelah 1997 Agustus, Jepang membantu Indonesia mengatasi krisis dengan memberikan bantuan seperti bantuan pinjaman khusus, restrukturisasi kredit dan dukungan kebijakan. Jepang juga memberikan bantuan sebesar 640.000.000 dolar AS ke Indonesia untuk rekonstruksi dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa besar di lepas pantai Sumatera dan tsunami di Samudera Hindia.

Bagi Indonesia, Jepang adalah pendonor bantuan terbesar dengan total bantuan sampai dengan 29.500.000.000 dolar AS. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan penerima bantuan Jepang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang merupakan mitra yang memiliki hubungan mutual yang penting dengan mempertahankan hubungan persahabatan yang baik selama setengah abad (The History of Official Development Assistance (ODA) from Japan to Indonesia, n.d.)

Untuk menangani permasalahan sanitasi di Indonesia, Jepang melalui ODANYA melakukan berbagai proyek bantuan kepada Indonesia, salah satunya adalah pada tanggal 11 Juli 2019, Jepang melalui JICA menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 30.980.000.000yen untuk proyek pembangunan Jakarta *Sewerage Development Proect Drainase*. Proyek ini melibatkan pembangunan pabrik pengolahan air limbah lanjutan pertama yang berskala besar, bersama

dengan pipa saluran pembuangan di Jakarta, dengan tujuan untuk mempromosikan pengolahan air limbah yang layak sesuai dengan standarisasi Jepang, meningkatkan lingkungan hidup dan sanitasi untuk masyarakat, dan melestarikan lingkungan perairan (Japan International Cooperation Agency, 2019).

### **3. Afrika (Sub-Sahara)**

Di negara-negara Afrika, khususnya Sub-Sahara, *sewerage* bukan hal yang umum dan pengolahan air limbah bahkan tidak umum. Toilet sering kali ditemui dalam bentuk lubang jamban individu atau toilet bersama. Dua dari tiga orang di negara Sub-Sahara tidak memiliki akses ke toilet. Meskipun akses air bersih tercapai cukup baik pada 2010, di Afrika secara keseluruhan, persentase orang tanpa akses ke fasilitas sanitasi dasar adalah 44% pada 2000 dan 37% pada 2010. Di Sub-Sahara, khususnya, 70 persen atau dua dari tiga orang, tidak memiliki akses ke toilet. Lingkungan sanitasi yang menyedihkan seperti itu menyebabkan masalah seperti diare yang meluas dan peningkatan angka kematian untuk anak-anak berusia lima tahun ke bawah, sehingga menjadikan sanitasi sebagai masalah prioritas di Afrika khususnya Sub-Sahara.

Untuk mengatasi masalah ini, JICA telah meluncurkan “*Project for Sanitation and Hygiene Improvement in Rural Areas of Tambacounda, Kedougou and Matam*” di Sinegal sebagai proyek kerja sama teknis pertama yang berfokus pada mempromosikan pembangunan toilet. Di Senegal,

populasi tanpa akses fasilitas sanitasi dasar tinggi, 71 persen pada 2010.

Namun, dalam banyak kasus bantuan pembangunan toilet, penduduk setempat tidak menggunakan atau merawatnya meskipun telah dibangun toilet dengan standar yang baik. Bagaimanapun juga, praktek menggunakan toilet memerlukan perubahan besar dalam kebiasaan gaya hidup bagi orang-orang yang terbiasa menggunakan toilet kuno. Sebelum mereka mengubah perilaku mereka, mereka perlu memahami kebutuhan untuk merubah dan menyadarinya. Oleh karena itu proyek ini telah mengadopsi metode yang disebut *Community-Led Total Sanitation* (CLTS), yang dikembangkan di Asia Selatan dan saat ini sedang menyebar di Afrika (JICA, 2013).



Sumber: (Focus on African Development , 2013).

*Gambar 13: Toilet tradisional yang biasa di gunakan di Sinegal*

Dari gambar 13 dapat dilihat toilet tradisional di Sinegal hanya terbuat dari lubang dan hanya di tutup

dengan alang-alang kering, tanah disekitar lubang dikeraskan dengan tanah liat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat belum memahami higienitas dan kebersihan serta pentingnya kesehatan karenanya hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat.



Sumber: (Focus on African Development, 2013)

*Gambar 14: Toilet yang dibangun oleh JICA*

Gambar 14 merupakan toilet yang dibangun oleh JICA, meskipun toilet ini terlihat lebih sederhana dibanding toilet flush yang lebih banyak dikenal namun toilet ini telah memiliki manajemen yang baik, terdapat dua container, ketika yang satu penuh maka yang lain dapat tetap digunakan. Dua ventilasi pipa dapat memberikan aliran udara yang dapat mencegah dari bau di dalam toilet, serta pintu logam yang kuat lebih menjaga privasi. Dari tipe toilet yang dibangun JICA, terdapat nilai-nilai mengenai modernitas melalui kebersihan dan higienitas.

*Tabel 1: Data komitmen anggota DAC  
(Development Assistance Committee) dalam bidang  
sanitasi*

<b>Country</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
<b>Japan</b>	1039	709	1938	3687	37%
<b>United States</b>	106	955	1017	2077	21%
<b>Germany</b>	350	424	402	1176	12%
<b>The Netherlands</b>	112	147	257	516	5%
<b>France</b>	169	176	114	458	5%
<b>Denmark</b>	57	249	176	485	5%
<b>Other Countries</b>	522	379	612	1513	15%
<b>Total</b>	2356	3039	4515	9910	100%

Sumber: (ODA Commitments of Major Development Assistance Committee (DAC) , 2014).

ODA Jepang dibidang sanitasi mengalami signifikansi yang menarik dari tahun ketahun, contohnya dari tahun 2003 hingga 2005 Jepang merupakan negara penyumbang ODA di bidang *water supply and sanitation* terbesar dibandingkan dengan negara lain yaitu sebanyak 37% . Hal ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara yang memiliki antusiasme lebih besar di dalam bidang sanitasi dibandingkan negara lainnya.